



ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

INOVASI KELEMBAGAAN KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS UNTUK MENINGKATKAN AKSES PETANI KECIL PADA SUMBER PERMODALAN



OLEH:
MAT SYUKUR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
BOGOR, 1 SEPTEMBER 2020



**ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG SOSIAL EKONOMI PERTANIAN**

**INOVASI KELEMBAGAAN
KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS
UNTUK MENINGKATKAN AKSES
PETANI KECIL PADA SUMBER
PERMODALAN**

Oleh:
MAT SYUKUR



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
BOGOR, 1 SEPTEMBER 2020**

INOVASI KELEMBAGAAN KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS
UNTUK MENINGKATKAN AKSES PETANI KECIL PADA SUMBER
PERMODALAN

MAT SYUKUR

© IAARD PRESS, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, 2020

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SYUKUR, Mat

Inovasi kelembagaan keuangan mikro agribisnis untuk meningkatkan akses petani kecil pada sumber permodalan /
Oleh Mat Syukur. -- Jakarta : IAARD Press, 2020.
viii, 51 hlm.: ill.; 21 cm

ISBN 978-602-344-290-4

631.115.8

1. Kelembagaan keuangan 2. Agribisnis 3. Petani

I. Judul

Penyunting Naskah : Tahlim Sudaryanto, Hasil Sembiring,
Bambang Subiyanto
Penata Letak : Niki Awalloedin
Perancang Cover : Restu Puji Hidayat

IAARD PRESS

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jln. Ragunan 29 Pasarminggu, Jakarta 12540
Telp.: +62-21-7806202, Faks: +62-21-7800644
Email : iaardpress@litbang.pertanian.go.id
Anggota IKAPI No. 445/DKI/2012

BIODATA RINGKAS



Mat Syukur, lahir di Lamongan, tanggal 28 Desember 1958, adalah anak pertama dari tujuh bersaudara dari Bapak Kasmolan (Almarhum) dan Ibu Rumi'ah (Almarhumah). Menikah dengan Hj. Henny Windarti (Almarhumah, 1983-2013) dan Erny Hertanti tahun 2015, dan dikaruniai empat orang anak, yaitu: Maulida Hayuningtyas, Listya Citraningtyas, Hanif Pramudya, dan Gigih Taufan Herdianto.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 2018 tanggal 5 Juni Tahun 2018 yang bersangkutan diangkat sebagai Peneliti Ahli Utama terhitung mulai tanggal 15 November 2018.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 716/KPTS/KP.220/H/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Majelis Pengukuhan Profesor Riset, yang bersangkutan dapat melakukan pengukuhan Profesor Riset.

Menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN Babat I, Babat, Lamongan pada tahun 1971; Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Negeri Babat, Lamongan pada tahun 1974; dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dari SMA Negeri IV Malang, tahun 1977. Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian Bidang Keahlian Sosial Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1982; Gelar Magister Sains (MS) Program Studi Ekonomi Pertanian dari IPB tahun 1988; dan Gelar Doktor Ekonomi Pertanian dari IPB tahun 2001.

Mengikuti beberapa pelatihan yang terkait dengan bidang kompetensinya, antara lain: *On The Job Training of Grameen Bank (Bank Desa) Replication Project for Rural Poverty Alleviation Program* di Bangladesh dan Malaysia, tahun 1989. *Financial Modeling for Grameen Bank (Bank Desa) Replication Project*, Dhaka, Bangladesh, tahun 1992. *Agro-Industrial System Development and Management* di Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, tahun 1993. *Micro-finance Management* di The University of Queensland, Brisbane, Australia, tahun 2002. *Leadership and Research Management* di Wageningen University, Belanda tahun 2004.

Penugasan keluar negeri antara lain sebagai Anggota Delegasi RI pada Pertemuan Menteri-Menteri Pertanian ASEAN (AMAF) di Manila tahun 2015, Ketua Delegasi RI pada Pertemuan Menteri-Menteri Pertanian Negara G-20 di China pada tahun 2016, Anggota Delegasi RI pada pertemuan AMAF di Singapore tahun 2016, Anggota Delegasi RI pada pertemuan AMAF di Thailand tahun 2017, Anggota Delegasi RI pada *Asia Pacific FAO Regional Meeting* di Fiji tahun 2018, Ketua Delegasi RI pada Pertemuan Menteri-Menteri Pertanian Negara G-20 di Argentina pada tahun 2018, sebagai Anggota Delegasi RI pada Pertemuan Menteri-Menteri Pertanian Negara G-20 di Jepang pada tahun 2019, Anggota Delegasi RI pada pertemuan AMAF di Brunei Darussalam tahun 2019.

Jabatan struktural yang pernah diduduki adalah sebagai berikut: Kepala Sub-Bidang Komunikasi Penelitian, Bidang Pelayanan Penelitian, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 1993-1994; Kepala BPTP Jawa Timur, 2004-2005; Kepala Bidang Program dan Evaluasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 2005-2006; Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian, Sekretariat Jenderal, 2006-2010; Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, 2010-2011; Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, 2011-2013; Staf Ahli Menteri

Bidang Inovasi dan Teknologi Kementerian Pertanian, 2013-2016; Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Kementerian Pertanian, 2016-2018.

Jabatan fungsional peneliti diawali sebagai Asisten Peneliti Madya tahun 1989, Ajun Peneliti Muda tahun 1993, Ajun Peneliti Madya tahun 1997, Peneliti Madya tahun 2006, dan memperoleh jabatan Peneliti Ahli Utama Gol IV/E tahun 2018.

Menghasilkan 26 karya tulis ilmiah yang ditulis sendiri maupun dengan penulis lain dalam bentuk buku, bagian buku, jurnal, prosiding, dan makalah yang diterbitkan, tiga diantaranya dalam bahasa Inggris. Mereplikasi skema kredit mikro *Grameen Bank*, Bangladesh di Indonesia melalui kaji tindak (*action research*) di Kabupaten Bogor pada tahun 1989-1992 dan Kabupaten Tangerang tahun 2002-2003, yang hingga saat ini telah berkembang menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan melayani 364.752 orang, tersebar di 3.244 desa di propinsi Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah.

Aktif menjalani tugas lain sebagai Wakil Tetap Kementerian Pertanian pada Dewan Energi Nasional (DEN) tahun 2014-2018.

Menjadi Anggota Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Anggota Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO), Anggota Perkumpulan Ahli Sistem Indonesia (PASINDO).

Memperoleh tanda penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX dari Presiden Republik Indonesia, masing-masing pada tahun 2000, 2008 dan 2013.

DAFTAR ISI

BIODATA RINGKAS	iii
DAFTAR ISI	vi
PRAKATA PENGUKUHAN	viii
I. PENDAHULUAN	1
II. DINAMIKA PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN KEUANGAN MIKRO DI SEKTOR PERTANIAN	3
2.1. Era Pra-Bimas Periode sebelum 1964	4
2.2. Era Kredit Bimas Periode 1964-1984	4
2.3. Era Kredit Usaha Tani (KUT) Periode 1985- 2000	5
2.4. Era Kredit Ketahanan Pangan dan Energi sampai Kredit Usaha Rakyat Periode 2000- Sekarang	6
III. KONSEPSI DAN SISTEM PEMBIAYAAN USAHA TANI PETANI KECIL	8
3.1. Konsep Skema Kredit Pertanian	8
3.2. Sumber Pembiayaan Pertanian	9
3.3. Kebutuhan Modal Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian	12
3.4. Praktek Perbankan dalam Pelayanan Kredit pada Sektor Pertanian	13
IV. INOVASI KELEMBAGAAN KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS	14
4.1. Keberadaan dan Skema LKMA	14
4.2. Tahapan Proses Pengelolaan dan Penyaluran Kredit	15
4.3. Implementasi LKMA	16
4.4. Peran dan Dampak LKMA	18
V. POTENSI, TANTANGAN, DAN PELUANG PENGEMBANGAN LKMA	19

5.1. Potensi	19
5.2. Tantangan	20
5.3. Peluang	21
VI. ARAH, SASARAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN LKMA	23
6.1. Arah Pengembangan	23
6.2. Sasaran Pengembangan	23
6.3. Strategi Pengembangan	23
VII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	25
7.1. Kesimpulan	25
7.2. Implikasi Kebijakan	26
VIII. PENUTUP	27
UCAPAN TERIMA KASIH	28
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN	38
DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH	39
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	44

PRAKATA PENGUKUHAN

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

*Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Bapak Menteri
Pertanian dan hadirin yang saya hormati,*

Pertama-tama, saya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan Profesor Riset di Bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Sesuai dengan latar belakang ilmu dan penelitian yang saya tekuni selama ini, orasi ilmiah yang saya sampaikan dihadapan majelis dan hadirin berjudul:

**“INOVASI KELEMBAGAAN KEUANGAN MIKRO
AGRIBISNIS UNTUK MENINGKATKAN AKSES
PETANI KECIL PADA SUMBER PERMODALAN”**

I. PENDAHULUAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya muliakan.

Dalam teori tentang pembangunan pertanian dikemukakan bahwa modal berperan sebagai pelancar pembangunan pertanian, dan dalam batas tertentu modal merupakan simpul kritis pembangunan^{1,2}. Dengan demikian pemerataan akses pada modal bagi semua golongan masyarakat, merupakan alternatif untuk pemerataan pendapatan^{3,4,5}. Bahkan akses pada modal dalam bentuk kredit merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar, sebagaimana hak-hak asasi lainnya⁶.

Bagi petani kecil, kehadiran modal dalam jumlah dan waktu yang tepat sangat menentukan keberhasilan usaha^{1,7}. Dengan akses pada sumber modal dalam bentuk kredit, para petani akan dapat mengoptimalkan sumberdaya yang ada pada dirinya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas, volume usaha dan pendapatan³.

Data nasional menunjukkan bahwa selama periode 2016-2018, penyaluran kredit untuk sektor pertanian berkisar antara 6,8-6,94%⁸. Persentase penyaluran yang rendah tersebut utamanya disebabkan karena pelaku usaha sektor pertanian memiliki akses yang rendah terhadap kredit perbankan. Selain karena kepemilikan agunan yang terbatas, sektor perbankan memandang bahwa sektor pertanian tergolong usaha berisiko tinggi, sehingga perbankan berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya⁹. Introduksi kelembagaan skema kredit pertanian sejak Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum dapat mendorong kenaikan penyaluran kredit ke sektor pertanian secara signifikan.

Akses permodalan petani kecil lebih banyak pada sumber pembiayaan non-formal di pedesaan, misalnya pelepas uang (rentenir), kios sarana produksi, dan sistem *yarnen* (dibayar kembali saat panen) dengan bunga tinggi, 3-4% per bulan^{10,11}. Di sisi lain, keuangan mikro berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja mandiri, memberdayakan masyarakat di pedesaan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi^{3,12}.

Hasil penelitian selama tahun 1990-2004 menunjukkan bahwa akses petani kecil terhadap permodalan formal sangat rendah, salah satunya disebabkan oleh ketiadaan agunan fisik. Karena itu, sebagian besar petani kecil memanfaatkan sumber permodalan non-formal, yang persyaratannya dan prosedurnya relatif mudah, serta cepat dalam penyalurannya. Dikaitkan dengan perlunya percepatan pemulihan ekonomi pertanian dan pedesaan pasca pandemi covid-19, kelembagaan keuangan mikro agribisnis dapat berperan lebih besar untuk meningkatkan akses petani pada permodalan sehingga para petani bisa berusaha tani secara optimal¹³.

Struktur penyaluran kredit yang kurang berpihak pada sektor pertanian tersebut memerlukan pendekatan lain yang lebih inovatif. Pendekatan tersebut berupa inovasi kelembagaan, yang dapat memitigasi risiko kredit, sehingga petani kecil dapat akses pada permodalan dari sumber internal dan perbankan. Kelembagaan kredit dimaksud terkait dengan tiga aspek, yaitu: (a) regulasi dan aturan main perkreditan, (b) lembaga sumber modal, dan (c) pengorganisasian di tingkat petani.

Orasi ini memaparkan sebuah gagasan baru untuk meningkatkan akses petani kecil pada sumber permodalan melalui inovasi kelembagaan, berupa tata kelola identifikasi kelayakan penerima, proses penyaluran dan pengembalian kredit, termasuk mekanisme untuk mengurangi risiko gagal bayar kredit, pada lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA).

II. DINAMIKA PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN KEUANGAN MIKRO DI SEKTOR PERTANIAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya hormati

Dinamika perkembangan skema kredit ini menekankan pada pembahasan tentang perkembangan aspek kelembagaan, yaitu aturan main dan lembaga yang terlibat dalam skema kredit pertanian. Perkembangan kelembagaan skema kredit ini dibagi dalam empat periode yaitu: (1) Era Pra-Bimas (Bimbingan Massal) Periode sebelum 1964. Pada era ini, dalam kondisi keterbatasan modal, praktek yang lazim dilakukan adalah sistem *ijon*, *sakap-menyakap*, dan *maro*; (2) Era Kredit Bimas Periode 1964-1984. Pada era ini petani diberi bimbingan intensif penerapan teknologi bercocok tanam padi melalui penyuluhan secara massal untuk menunjang program intensifikasi dan ditunjang dengan sistem perkreditan; (3) Era Kredit Usaha Tani (KUT) Periode 1985-2000. Pada era ini, komoditas yang difasilitasi kredit diperluas, meliputi padi, palawija dan hortikultura. Kredit disalurkan melalui Koperasi Unit Desa (KUD) atau kelompok tani. Bank penyalur menanggung risiko kredit; (4) Era KKP-E sampai KUR Periode 2000-Sekarang. Di era ini pemerintah mengintroduksikan skema kredit yang lebih banyak, yaitu KKPE untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) untuk mendukung swasembada daging sapi, Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) untuk perkebunan rakyat, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk semua skema kredit tersebut, pemerintah memberikan fasilitas subsidi bunga/margin. Sumber utama dana kredit berasal dari perbankan, dan perbankan menanggung seluruh risiko kredit.

2.1. Era Pra-Bimas Periode sebelum 1964

Sejak zaman dahulu, jauh sebelum Bimas, petani sudah mengenal modal dan kredit dalam bentuk lain. Ini dibuktikan dengan adanya praktek *ijon*, sistem bagi hasil yang dikenal dengan *sakap-menyakap*, *maro* yang lazim berlaku saat modal usaha petani terbatas⁹, dan bahkan praktek tersebut masih ada hingga saat ini. Namun kemudian, dalam rangka meningkatkan produksi beras, beberapa tahun sebelum era Bimas (Bimbingan Massal), dilaksanakan program intensifikasi padi oleh Perusahaan Padi Sentra. Melalui Inpres tahun 1959 dibentuk Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM) dengan tugas menyelenggarakan penyuluhan, penyaluran dan pengembalian kredit, pengadaan pangan dan memberantas sistem *ijon* yang banyak berkembang di desa¹⁴. Era Padi Sentra ini dapat disebut sebagai awal terbangunnya sistem kredit formal dan terprogram oleh pemerintah.

2.2. Era Kredit Bimas Periode 1964-1984

Era kredit pertanian diawali dengan kredit program oleh perusahaan Padi Sentra, dan dilanjutkan untuk Program Bimas pada tahun 1964-1966. Dalam program Bimas, petani diberi bimbingan intensif melalui penyuluhan secara massal dan difasilitasi dengan kredit sarana produksi. Untuk memperluas Program Bimas pemerintah tidak memiliki dana yang cukup. Untuk itu diwujudkan Program Bimas Gotong Royong pada tahun 1969, yang merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan-badan usaha swasta asing. Selanjutnya pada tahun 1970 diubah menjadi Bimas yang Disempurnakan, yang dalam implementasinya dengan menggunakan pendekatan wilayah unit desa¹⁴, yang tujuannya adalah meningkatkan produksi beras nasional. Keberhasilan Program Bimas ditunjang oleh keberadaan kredit pertanian, yaitu kredit yang dirancang secara khusus untuk mendukung program Bimas¹⁵.

Program Bimas telah berhasil mengantarkan Indonesia berswasembada beras pada tahun 1984¹⁴. Keberhasilan ini disebabkan oleh karena skema kredit Bimas diimplementasikan sebagai bagian dari sistem pembangunan perdesaan yang lengkap dengan kelembagaannya. Komponen pendukung berupa fasilitas kredit, penyediaan sarana produksi, Koperasi Unit Desa (KUD) untuk menampung hasil produk, pendampingan oleh penyuluh, dan adanya sistem komando sentralistik dalam pelaksanaannya. Kelebihan dan sekaligus keterbatasan Program Bimas diantaranya adalah hanya fokus pada komoditas padi. Sementara itu komoditas lainnya belum memperoleh perhatian yang sepadan, padahal petani komoditas lain juga mengharapkan dukungan kredit serupa.

2.3. Era Kredit Usaha Tani (KUT) Periode 1985-2000

Era skema KUT dimulai pada tahun 1985. Komoditas yang mendapat fasilitas kredit adalah padi, palawija dan hortikultura. Penyaluran kredit ini melalui kelompok, dengan sumber dana berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)^{14,16}. Pada era ini dikenal KUT Pola Umum dan Pola Khusus. Penyaluran kredit Pola Umum dilakukan melalui KUD dan Pola Khusus dilakukan langsung kepada kelompok tani. Bunga pinjaman yang dikenakan sebesar 14% per tahun. Lembaga yang terlibat adalah Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, dan bank penyalur.

Pada periode sebelum tahun 1998, bank berperan sebagai pelaksana dan ikut menanggung risiko kredit, sehingga berhati-hati saat menyalurkan kredit. Data penyaluran KUT musim *rendeng* (penghujan) periode Oktober-Maret musim tanam 1985-1996 mengkonfirmasi hal tersebut, yaitu berkisar 19-70% dari plafon kredit¹. Realisasi penyaluran KUT yang rendah ini mengindikasikan bahwa ada hambatan dalam penyaluran KUT. Hambatan utamanya adalah prosedur pengajuan dan mekanisme

penyaluran kredit yang lambat dan rumit. Pada tahun 1998/1999, KUT disalurkan melalui koperasi tani/LSM dan bunga kredit diturunkan menjadi 10,5%. Penyaluran kredit berjalan lancar, tetapi diikuti dengan tunggakan yang besar.

2.4. Era Kredit Ketahanan Pangan dan Energi sampai Kredit Usaha Rakyat Periode 2000-Sekarang

Sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah tidak lagi menyediakan sumber dana dari KLBI. Atas pertimbangan tersebut, pada tahun 2000 diterbitkan skema Kredit Ketahanan Pangan (KKP), yang selanjutnya menjadi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Sumber dana kredit berasal dari perbankan, dan pemerintah menyediakan subsidi bunga kredit¹⁷.

Tujuan skema KKP-E adalah untuk mendukung peningkatan produksi pangan dan penyediaan bahan baku bahan bakar nabati. Sasaran KKP-E adalah petani, peternak, pekebun secara individu, kelompok tani, dan koperasi. Bunga yang dikenakan kepada petani tebu sebesar 8,25%, peternak sebesar 6,0%, dan petani pangan dan hortikultura sebesar 5,5%. Selisih antara bunga bank dengan bunga yang dibayar petani ditanggung oleh pemerintah, sebagai subsidi bunga.

Pada periode ini pula dikenal skema kredit dalam rangka pengembangan perkebunan (kelapa sawit, karet dan kakao) dan peternakan (pembibitan sapi), yaitu Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Pada kedua skema tersebut, pemerintah juga menyediakan subsidi bunga. Periode 2000-2015, kinerja serapan KKP-E, KPEN-RP dan KUPS tergolong sangat rendah. Oleh karena itu pada tahun 2015 ketiga skema tersebut diintegrasikan ke skema KUR yang diluncurkan pada tahun 2007, yang cikal bakalnya adalah Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) yang dilaksanakan oleh

Kementerian Pertanian. Sasaran KUR adalah debitur perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Salah satu tujuan KUR adalah meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, utamanya usaha mikro, kecil dan menengah. Seluruh sektor menjadi sasaran skema KUR, tidak hanya sektor pertanian. Seluruh dana KUR yang disalurkan berasal dari penyalur KUR. Hingga tahun 2019, pemangku kepentingan yang terlibat pada skema KUR terdiri atas 44 lembaga penyalur, 11 lembaga penjamin, dua lembaga pengawas dan 14 instansi pusat, serta pemerintah daerah.

Selama tahun 2007-2014, pemerintah memberikan subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP), yaitu premi penjaminan kredit. Bunga pinjaman KUR pada periode awal adalah 24% per tahun. Sejak tahun 2015, bunga diturunkan menjadi 12% per tahun, dan terus menurun hingga pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 6% per tahun efektif.

III. KONSEPSI DAN SISTEM PEMBIAYAAN USAHATANI PETANI KECIL

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang terhormat,

Karakteristik petani, kelembagaan dan seperangkat aturannya sangat menentukan akses petani pada sumber pembiayaan. Pemahaman terhadap konsep skema kredit sangat penting. Gabungan antara konsep, karakteristik petani dan kelembagaan tersebut adalah dasar untuk menyusun fitur kredit.

3.1. Konsep Skema Kredit Pertanian

Pasar kredit secara inheren bersifat tidak sempurna. Di dalam pasar kredit terdapat ketidakpastian tentang selesainya sebuah transaksi kredit. Sebuah transaksi kredit dinyatakan selesai apabila peminjam telah membayar semua jumlah yang dipinjam beserta bunga^{3,18}.

Pemberi pinjaman mempunyai risiko lebih besar daripada peminjam. Jaminan perorangan dapat mengurangi risiko tanpa harus menambah biaya transaksi¹⁸. Inovasi jaminan selanjutnya adalah agunan fisik, yang kemudian berkembang dan diperluas menjadi agunan dalam bentuk kelayakan usaha dan jaminan kelompok¹⁸.

Petani sebagai peminjam dihadapkan pada risiko dalam mengelola usaha taninya. Kelembagaan kelompok tani beserta perangkat aturannya merupakan komponen dalam skema kredit mikro. Kelembagaan tersebut dapat berfungsi sebagai penjamin atas kredit yang diterima anggota kelompok, sehingga dapat memitigasi risiko gagal bayar kredit^{3,19}.

3.2. Sumber Pembiayaan Pertanian

Di wilayah pedesaan terdapat banyak lembaga keuangan, baik formal maupun non-formal. Dalam operasionalnya masing-masing jenis lembaga keuangan memiliki segmen pasar yang berbeda³. Terjadinya segmentasi pasar ini karena adanya penghalang kelembagaan (*institutional barrier*) bagi golongan ekonomi lemah untuk akses pada lembaga keuangan formal^{3,5}.

Kredit formal dapat dibagi menjadi kredit non-program dan kredit program. Kredit non-program adalah jenis kredit yang dalam mekanisme pengajuan dan penyalurannya menggunakan mekanisme pasar, dengan bunga komersial. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum dan koperasi simpan pinjam menyalurkan jenis kredit ini²⁰. Sementara itu kredit program adalah skema kredit yang dalam implementasinya dikaitkan dengan suatu program sektoral pemerintah, yang umumnya adalah kredit bersubsidi. Untuk sektor pertanian, dikenal skema kredit Bimas, KUT, KKP-E³, dan skema program terkini untuk usaha mikro kecil (UMK) adalah KUR. Dalam konteks ini, Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian tahun 2008-2015 di 52.000 desa yang telah menumbuhkan lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) sebanyak 7.040 unit atau 13,5% dari jumlah desa dimaksud, juga merupakan sumber permodalan bagi petani kecil.

Pengalaman menunjukkan bahwa kredit program yang berbiaya murah, yang umumnya berasal dari pemerintah, banyak mengalami kegagalan. Secara umum, kegagalan ini terutama disebabkan oleh lemahnya dalam seleksi terhadap sasaran (pengguna) kredit. Kegagalan ini terletak tidak hanya pada kegagalan mencapai sasarannya, tetapi juga kegagalan dalam mencapai kinerja pengembalian³.

Dalam skema kredit Bimas, kredit bersubsidi diberikan dalam bentuk *natura*, dikawal intensif oleh para penyuluh, dengan menggunakan pendekatan kelompok. Petani memperoleh input produksi dan mengadopsi teknologi baru dan dapat meningkatkan produktivitas usaha taninya, dan secara nasional berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984^{14,21}. Hanya saja, sukses ini tidak diikuti dengan tingkat pengembalian pinjaman yang memuaskan.

Salah satu faktor yang menyebabkan skema kredit program belum memiliki pengembalian yang tinggi karena proses seleksi bagi calon peserta yang tidak terlalu ketat²¹. Selain itu, kelembagaan kelompok yang masih lemah, aturan main tentang skema kredit tidak diimplementasikan secara tegas, serta lemahnya sosialisasi hak dan kewajiban pengguna kredit merupakan faktor lainnya yang mempengaruhi banyaknya kasus tunggakan kredit. Sementara itu skema KKPE, KUPS dan KUR berkinerja baik dalam pengembalian kredit, tetapi sangat lambat dalam penyalurannya.

Faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap pengembalian kredit Bimas adalah lamanya petani mengikuti program intensifikasi dan tagihan langsung yang dilakukan oleh petugas²². Semakin lama mengikuti Program Bimas dan adanya tagihan langsung oleh petugas berdampak positif pada tingkat pengembalian kredit. Fasilitas kredit dapat meningkatkan penggunaan input secara optimal yang berdampak pada kenaikan produksi dan pendapatan dan bersedia mengembalikan kredit, karena adanya kontrol langsung oleh petugas.

Pada skema KUT Pola Khusus, faktor-faktor yang berpengaruh positif pada pengembalian kredit adalah pengalaman sebagai peserta KUT, keterlibatan pada penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), jumlah tabungan di kelompok tani, dan frekuensi pembinaan oleh

PPL²³. Sementara itu faktor utama yang menjadi pertimbangan petani tertarik memanfaatkan kredit adalah prosedur pengajuan dan penyaluran yang sederhana. Sedangkan besarnya bunga pinjaman bukanlah hambatan bagi petani untuk meminjam kredit¹⁰. Kaji tindak tentang kredit perdesaan mencatat bahwa kelompok yang kokoh dan berdisiplin, intensitas pertemuan antara penerima kredit dengan petugas kredit, pemahaman penerima kredit terhadap hak dan kewajibannya, pelatihan bagi calon penerima dan petugas kredit, serta sistem insentif dan sanksi yang jelas, adalah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kualitas penyaluran dan pengembalian kredit^{19,24}.

Deregulasi perbankan pada tahun 1988, yang memberikan kemudahan pendirian bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang dapat beroperasi hingga wilayah perdesaan, menyebabkan monetisasi perdesaan dan sektor pertanian menjadi hal yang tidak dapat terhindarkan. Mekanisme penyaluran kredit ke sektor pertanian di daerah perdesaan mengikuti mekanisme penyaluran kredit komersial. Hal ini merupakan justifikasi mengapa kredit seyogyanya dikelola secara profesional dan mengikuti mekanisme pasar. Peran pemerintah adalah memberikan subsidi bunga/margin dan pengawasan dalam implementasinya.

Selain dari sumber pembiayaan formal, petani juga banyak memiliki akses pada sumber pembiayaan non-formal, seperti pelepas uang, tengkulak, atau kios sarana produksi, dengan bunga yang tinggi^{3,25}. Sumber non-formal ini memiliki kelebihan untuk menarik minat peminjam, yaitu fleksibel dalam menyediakan jumlah pinjaman, cepat dalam penyaluran, persyaratannya sederhana dan mudah dipenuhi oleh petani, serta berlokasi dekat dengan domisili petani^{3,26}.

3.3. Kebutuhan Modal Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian

Sebagai ilustrasi kebutuhan modal usaha pertanian dapat diambil contoh usaha tani padi, yang umumnya dilakukan oleh petani kecil dan meliputi hampir semua wilayah di Indonesia. Secara nasional, dengan luas panen padi tahun 2019 mencapai 10,68 juta hektar²⁷, para petani padi memerlukan modal sekitar Rp110 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk untuk tanaman pangan lainnya, seperti komoditas jagung, ubi kayu, dan kebutuhan modal untuk sub sektor perkebunan, peternakan serta hortikultura.

Bagi petani padi yang rata-rata memiliki luas lahan 0,4 ha, memerlukan modal usaha sekitar Rp 5 juta per musim¹⁷. Tetapi karena petani kecil umumnya tidak memiliki lahan bersertifikat, maka akses petani pada sumber perbankan mengalami kesulitan. Lembaga perbankan sangat ketat dalam menseleksi calon peminjamnya. Dalam banyak kasus, agunan dalam bentuk fisik berupa sertifikat tanah masih diperlukan. Karena hal tersebut, kebutuhan modal skala mikro sebagian besar diperoleh dari sumber non-formal, yaitu pinjaman perorangan, keluarga, pelepas uang. Selebihnya berasal dari koperasi dan lembaga keuangan non bank²⁸.

Gambaran di atas menunjukkan perlunya eksplorasi terhadap kemampuan menabung petani dari hasil usaha taninya secara sistematis, sebagai bagian dari upaya pemupukan modal internal petani dan kelompok tani. Modal dasar berupa budaya gotong royong sangat mendukung upaya ini. Beberapa pengalaman lembaga keuangan mikro di perdesaan menunjukkan bahwa tabungan yang dihimpun oleh anggotanya dapat menjadi kekuatan modal internal yang besar bagi keberlanjutan lembaga tersebut^{29,30}.

3.4. Praktek Perbankan dalam Pelayanan Kredit pada Sektor Pertanian

Lazimnya praktek perbankan, prinsip kehati-hatian (*prudent*) senantiasa menjadi acuan dalam menyalurkan pinjaman kepada calon nasabahnya. Prinsip 5-C, yaitu *character, capacity, condition of economy, capital dan collateral* senantiasa menjadi pertimbangan bank dalam seleksi bagi calon peminjam^{3,31}. Para petani kecil umumnya gagal dalam tahap seleksi ini untuk akses permodalan dari bank, utamanya adalah karena ketiadaan agunan^{32,33}.

Jaringan pelayanan perbankan umumnya hanya sampai pada tingkat kabupaten/kota. Sementara itu petani berdomisili di wilayah perdesaan. Dengan demikian, terdapat senjang lokasi antara domisili petani dengan pusat layanan perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut dan untuk mengurangi biaya transaksi kredit, maka pembentukan dan pengembangan LKMA yang berlokasi di tingkat desa hingga tingkat kecamatan merupakan pilihan yang tepat³⁴. LKMA dapat melayani langsung kebutuhan permodalan petani kecil, dan sekaligus sebagai “jembatan” untuk akses pada lembaga perbankan melalui program *linkage*.

Pelajaran yang dapat dipetik dari penerapan sistem permodalan melalui implementasi empat periode skema kredit program dan perilaku petani kecil terhadap kredit, serta praktek perbankan, adalah bahwa perspektif skema kredit ke depan perlu menekankan pada aspek kelembagaan, utamanya menyiapkan sistem penerimaan kredit di tingkat petani melalui edukasi. Selain itu, skema tersebut perlu memperhatikan faktor-faktor^{2,3,35}: 1)Penyaluran melalui kelompok; 2)Pemberian subsidi bunga; 3)Pendampingan kepada petani oleh penyuluh; 4)Pengaturan kewajiban menabung; 5)Pengecekan penggunaan kredit; 6)Pemberian dukungan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya dalam pembinaan dan pengawasan.

IV. INOVASI KELEMBAGAAN KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang terhormat,

Rendahnya penyaluran kredit perbankan pada sektor pertanian, maka mulai tahun 2008 Kementerian Pertanian merumuskan dan merealisasikan program PUAP. Program ini memberikan modal awal sebesar Rp 100 juta untuk setiap Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di setiap desa^{36,37}. Menyadari pentingnya akses petani pada sumber permodalan, dan berbekal pengalaman empirik pengimplementasian kaji tindak skema kredit mikro perdesaan melalui program PUAP yang dilaksanakan selama delapan tahun, hingga tahun 2015, berhasil dikembangkan suatu inovasi kelembagaan keuangan mikro agribisnis yang handal.

4.1. Keberadaan dan Skema LKMA

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 86 ayat (3) mengamanatkan bahwa bank dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk usaha tani. Penyaluran tersebut dilaksanakan melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis. Hal ini berarti bahwa LKMA memiliki peran strategis dalam penyaluran kredit kepada petani/kelompok tani. LKMA adalah wahana untuk memecahkan kendala akses permodalan bagi petani kecil, memberikan layanan kredit dan tabungan, berlokasi di perdesaan, dengan syarat yang sederhana dan mudah.

Pengalaman empiris melaksanakan kaji tindak tentang kelembagaan keuangan mikro di daerah perdesaan untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bogor tahun 1989-1992

dan di Kabupaten Tangerang tahun 2002-2003, menunjukkan bahwa masyarakat golongan berpendapatan rendah yang memiliki usaha produktif, termasuk petani kecil, mampu bekerja keras dan mandiri untuk meningkatkan pendapatan keluarganya. Mereka menguasai proses produksi, dan mengetahui kepada siapa produk yang dihasilkan harus dijual. Sejatinya mereka memerlukan modal usaha dengan cara yang mudah dengan bunga yang rendah^{19,38,39}.

4.2. Tahapan Proses Pengelolaan dan Penyaluran Kredit

Secara ringkas terdapat empat tahapan inovasi kelembagaan dalam pengelolaan dan penyaluran kredit mikro adalah sebagai berikut. *Pertama*, sosialisasi kepada masyarakat tentang pengembangan lembaga keuangan mikro di kawasan pengembangan. *Kedua*, proses seleksi kelayakan bagi calon peminjam melalui uji kelayakan guna memperoleh calon penerima kredit yang memiliki usaha produktif dan prospektif. Para calon terpilih membentuk kelompok yang anggotanya sebanyak lima orang yang bertempat tinggal berdekatan dan memiliki kondisi sosial ekonomi yang relatif homogen.

Ketiga, setelah terbentuk kelompok, seluruh anggota wajib mengikuti pelatihan, yang materinya adalah fitur skema kredit, hak dan kewajiban anggota, serta sistem insentif dan sanksi. Uji pengesahan kelompok dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh anggota mengerti tentang skema kredit. *Keempat*, proses pengajuan, penyaluran dan pengembalian pinjaman. Proses ini diikuti dengan kewajiban menabung dan dilaksanakan secara reguler di tempat yang telah disepakati bersama. Petugas kredit hadir pada pertemuan reguler untuk menatausahakan transaksi kredit dan tabungan. Efisiensi dan efektivitas menjadi pertimbangan utama, agar biaya transaksi rendah dan pelayanan kredit lebih efisien^{24,38,39}.

Keempat tahapan tersebut merupakan simpul-simpul kritis keberhasilan implementasi skema kredit untuk Lembaga Keuangan Mikro^{24,33,39}. Inovasi skema kredit ini telah berhasil diimplementasikan di Kabupaten Bogor dan Tangerang. Hingga kini, skema tersebut telah melayani anggota sebanyak 364.752 orang, terhimpun dalam 74.725 kelompok. Kumulatif pinjaman yang disalurkan sebesar Rp 6,71 triliun dengan persentase tunggakan berkisar antara 0,05% hingga 0,30%. Sementara itu, tabungan yang berhasil dihimpun sebanyak Rp 850 milyar.

Pelajaran penting dari implementasi skema kredit tersebut adalah bahwa faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya yaitu: (1) proses seleksi sejak uji kelayakan calon peminjam, (2) pelatihan bagi calon peminjam tentang aturan main skema kredit, (3) pemahaman terhadap hak dan kewajiban peminjam, (4) penegakan aturan main, (5) akuntabilitas administrasi pinjaman, (6) petugas lapang yang berdisiplin dan terlatih, serta (7) dukungan modal awal dari pemerintah³⁹.

4.3. Implementasi LKMA

Bertitik tolak dari karakteristik dan akses petani pada sumber-sumber permodalan, implementasi skema-skema kredit program di masa yang lalu, pengalaman kaji tindak tentang skema kredit mikro untuk golongan miskin di perdesaan Kabupaten Bogor dan Tangerang, serta dikaitkan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memberikan akses permodalan kepada usaha mikro kecil dan menengah, maka pilihan lembaga yang sesuai bagi petani kecil adalah LKMA. Pilihan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa LKMA umumnya berlokasi di daerah perdesaan, tumbuh dan mengakar di tengah kehidupan petani. Cikal bakal LKMA adalah Program PUAP.

Untuk mengurangi risiko gagal bayar kredit yang mungkin timbul diusulkan agunan tunai berupa tabungan petani secara kolektif yang dihimpun di LKMA. Selain itu juga diperlukan

fasilitator pembiayaan pertanian (FPP) untuk mendampingi petani dan LKMA dalam hal pengelolaan kredit. Operasionalisasi inovasi kelembagaan LKMA, yang dimulai dengan proses seleksi petani calon penerima kredit sampai penyaluran dan pengembalian kredit disajikan pada Lampiran 1.

Fitur skema kredit bagi petani kecil memiliki lima karakteristik, yaitu^{1,40,41}: (1) mengakomodasi besaran kredit yang diperlukan petani kecil, (2) dapat melayani kebutuhan modal untuk seluruh sub sistem agribisnis, utamanya sub sistem produksi, (3) fleksibel dalam hal waktu pelayanan dan penyaluran sesuai dengan musim, (4) mampu menjawab kebutuhan petani dalam kaitannya dengan program kemitraan antara petani/kelompok tani dengan mitra usaha, dan (5) prosedur pengajuan, penyaluran dan pengembalian yang sederhana.

Skema kelembagaan LKMA bagi petani kecil memiliki sembilan fitur khusus^{3,35,42}, yaitu: (1) menggunakan pendekatan kelompok untuk proses seleksi calon penerima kredit, (2) menyelenggarakan pelatihan bagi petani sebagai calon penerima kredit, sebagai bagian dari proses seleksi, (3) menyalurkan kredit tanpa agunan dan penjamin; (4) mengimplementasikan prosedur pengajuan dan penyaluran sederhana dan cepat, (5) melakukan pelayanan kredit pada pertemuan rutin dua-mingguan, yaitu untuk pengajuan, penyaluran, pengembalian kredit, dan menabung (6) menugaskan fasilitator/petugas kredit hadir pada setiap pertemuan rutin dua-mingguan, (7) menerapkan mekanisme monitoring penggunaan pinjaman (*loan utilization check*), (8) mewajibkan peminjam menabung rutin pada setiap pertemuan dua-mingguan, guna memupuk modal bagi petani/kelompok tani, dan (9) mengenakan bunga/margin kredit/pembiayaan yang layak untuk menjamin keberlanjutan LKMA.

Untuk meningkatkan kapasitas permodalan LKMA, maka program *linkage* dengan perbankan secara bertahap perlu dilakukan, agar akses petani kecil pada sumber permodalan dapat terus ditingkatkan dan berkelanjutan. Efektivitas implementasi skema LKMA tersebut memerlukan dukungan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah^{19,43,44}, yaitu: (1) adanya pendamping/fasilitator pembiayaan pertanian untuk petani, dan (2) dukungan subsidi bunga/margin kredit untuk mengurangi risiko kredit, serta premi asuransi untuk mengurangi risiko gagal usahatani, yang disebabkan oleh hama penyakit dan kekeringan. Untuk mengurangi *moral hazard* dalam penyaluran kredit, peran pemerintah berada “di belakang”, dalam arti bertindak sebagai regulator dan fasilitator, dan bukan sebagai pelaksana kredit.

4.4. Peran dan Dampak LKMA

Disamping kelebihan yang dimiliki, skema LKMA tersebut masih memerlukan dukungan dana pemerintah. Dana tersebut diantaranya adalah untuk dana awal (*seed capital*) bagi LKMA, dana pelatihan, dan subsidi bunga/margin, premi asuransi dari pemerintah di awal penumbuhannya. Mengingat karakteristik dan keterbatasan petani kecil, skema kredit LKMA ini sangat diperlukan dan berperan penting bagi petani kecil di masa-masa mendatang, dan juga menjadi wahana untuk akses pada sumber permodalan perbankan yang lebih luas.

Argumentasinya adalah manfaat dan dampaknya, yaitu: 1) mudahnya akses petani pada permodalan secara berkelanjutan untuk membiayai usaha taninya; 2) petani memiliki kesempatan mengadopsi teknologi berproduksi secara maksimal; 3) petani dapat meningkatkan produktivitas, produksi, dan pendapatan serta kesejahteraan; 4) petani memiliki layanan tabungan melalui LKMA, sebagai sarana untuk pemupukan modal internal petani, kelompok tani dan LKMA.

V. POTENSI, TANTANGAN, DAN PELUANG PENGEMBANGAN LKMA

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya hormati,

Inovasi kelembagaan keuangan mikro sangat diperlukan untuk meningkatkan akses petani kecil pada sumber permodalan. Inovasi ini memiliki potensi dan peluang yang besar untuk dikembangkan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya juga tidaklah ringan dan memerlukan kesungguhan dalam mengatasinya.

5.1. Potensi

Pada tahun 2008 Kementerian Pertanian meluncurkan program PUAP, untuk meningkatkan kinerja berbagai program pembiayaan Kementerian Pertanian menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam memfasilitasi akses permodalan petani^{36,37,45}. Dari program PUAP tersebut, telah terbentuk 7.040 LKMA, yang sebagian besar berbadan hukum koperasi, dan 115 LKMA diantaranya telah memperoleh ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari total jumlah desa yang telah menerima dana awal PUAP tahun 2008-2015, terdapat sekitar 45.000 desa atau 59,6% dari total desa yang belum terbentuk LKMA, dan ini adalah potensi yang sangat besar bagi penumbuhan LKMA baru.

Apabila jumlah petani anggota baru di setiap LKMA eksisting rata-rata dapat ditingkatkan sebanyak 150 orang, maka potensi tambahan petani yang dapat dilayani adalah sebanyak satu juta orang. Dengan rata-rata penguasaan lahan petani seluas 0,4 ha, maka potensi usaha tani yang dapat difasilitasi LKMA adalah seluas 400.000 ha. Luasan tersebut akan terus bertambah sejalan dengan perkembangan dan kemajuan LKMA.

Di sisi lain, kebutuhan modal bagi petani secara keseluruhan masih sangat besar. Untuk petani padi memerlukan modal tidak kurang dari Rp 110 triliun per tahun. LKMA, selain atas kemampuannya menjadi sumber permodalan petani kecil, LKMA sebagai wahana untuk akses pada sumber pembiayaan dari perbankan melalui program *linkage*. Agar perbankan memiliki keyakinan dan dapat dibangun *trust* dalam penyaluran kredit ke petani, maka mobilisasi tabungan dari petani harus ditumbuhkembangkan sebagai agunan tunai.

Kehadiran fasilitator pembiayaan pertanian (FPP) sangat penting untuk mendampingi petani dan LKMA dalam mengelola modal untuk usahatani. Bercermin dari pengalaman menjalankan dan mengelola LKM di perdesaan selama lebih dari lima tahun, sumber daya manusia pengelola LKM ini berperan besar untuk mencapai kinerja terbaiknya. Jumlah PPL yang cukup banyak saat ini, yaitu 38.459 orang merupakan modal dasar bagi proses pendampingan LKMA ke depan. FPP dapat juga direkrut dari tenaga penyuluh tersebut melalui seleksi yang ketat dan terukur agar diperoleh tenaga pendamping yang handal.

5.2. Tantangan

Pengembangan LKMA sebagai lembaga ekonomi petani untuk membuka akses petani pada sumber permodalan akan menghadapi beberapa tantangan meliputi persaingan dengan lembaga keuangan mikro sejenis, merubah *mindset* petani dan mengintegrasikannya ke sektor perbankan. Tantangan tersebut diantaranya adalah banyaknya lembaga keuangan mikro sejenis yang ada di wilayah yang sama, yang umumnya bersifat non-formal, yang memberikan pelayanan yang mudah dan cepat, meskipun dengan bunga yang tinggi, misalnya kios sarana produksi, para pelepas uang yang beroperasi di wilayah perdesaan^{1,10}. Keunggulan LKMA adalah mempunyai fitur yang

mirip dengan lembaga keuangan mikro sejenis, dimiliki oleh petani anggota dan dirancang untuk kepentingan petani, serta memberikan pelayanan tabungan bagi petani. Fitur ini yang menjadi andalan sehingga dapat bersaing dengan lembaga sejenis.

Adapun tantangan yang paling besar adalah merubah *mind-set* petani kecil bahwa kredit dari LKMA itu bukan bantuan cuma-cuma dari pemerintah yang tidak harus dikembalikan lagi, meskipun ada dukungan pemerintah dalam bentuk *seed capital*⁴⁶. Kredit tersebut harus dikembalikan pokok dan bunga/marjinnnya, agar LKMA dapat terus berkembang dan berkelanjutan serta menjadi sumber utama permodalan petani. Pinjaman tersebut harus digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan petani juga dimotivasi untuk menabung dari hasil usahanya dalam rangka untuk mengatasi persoalan gagal bayar kredit. Kesadaran seperti ini perlu terus ditumbuhkan.

Tantangan lain adalah kesiapan tenaga pendamping yang memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi, menumbuhkan mental disiplin dan motivasi yang tinggi bagi petani, serta menumbuhkan kepercayaan petani, pemerintah dan pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan LKMA. Tantangan selanjutnya adalah mengintegrasikan LKMA ke sektor perbankan dalam bentuk program *linkage*. Untuk mengembangkan program *linkage* dengan sumber pembiayaan formal, misalnya dengan bank penyalur KUR, diperlukan kelembagaan LKMA yang sehat dan mandiri yang menjalankan kaidah-kaidah praktek pengelolaan keuangan yang baik^{47,48}.

5.3. Peluang

Saat ini dan ke depan pemerintah memiliki komitmen yang tinggi pada aspek permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah, termasuk bagi petani kecil di perdesaan. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan adalah program KUR dan

adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pembiayaan Usaha Tani yang mengamanatkan adanya kewajiban Bank-Bank Pemerintah dan Pemerintah Daerah membentuk Unit Khusus Pertanian (UKP), serta Penempatan Uang Negara (PUN) kepada bank-bank BUMN untuk permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini merupakan peluang yang sangat besar bagi LKMA untuk dapat berkembang melalui program *linkage*, dalam rangka meningkatkan kapasitas modal dan membuka akses permodalan yang lebih luas lagi bagi petani kecil.

Target penyaluran skema KUR semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, peningkatan target persentase penyaluran KUR untuk sektor produksi, termasuk sektor pertanian, juga semakin besar dari tahun ke tahun. Kebutuhan modal bagi pengembangan sektor pertanian juga sangat besar. Bagi petani kecil, melalui LKMA, perhatian pemerintah yang besar ini dapat dimanfaatkan oleh LKMA untuk mendorong kegiatan *linkage* dengan lembaga penyalur KUR, baik bank maupun bukan bank⁴⁹.

Terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga menjadi pondasi yang kuat bagi pengembangan LKMA. Melalui LKMA tersebut, petani akan memiliki akses permodalan secara lebih luas lagi. Dengan akses ini, maka petani akan dapat meningkatkan akses pada sumber-sumber teknologi baru dan informasi guna mengoptimalkan sumberdaya yang ada pada dirinya guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya³.

VI. ARAH, SASARAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN LKMA

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya hormati,

6.1. Arah Pengembangan

Pengembangan LKMA ini diarahkan untuk mewujudkan dan mempercepat program nasional keuangan inklusif. Pengembangan ini juga diarahkan sebagai alternatif mempercepat penyaluran skema kredit program KUR.

Dalam jangka menengah, pengembangan diarahkan untuk mendukung implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Terkait aspek pemberdayaan ini, maka keberpihakan, penguatan, dan komitmen pemerintah kepada petani kecil melalui dukungan permodalan menjadi kata kunci¹⁹.

6.2. Sasaran Pengembangan

Sasaran pengembangan kelembagaan difokuskan pada kelompok petani kecil yang memiliki usaha produktif pertanian di wilayah yang telah memiliki LKMA maupun yang belum memiliki LKMA, namun memiliki akses rendah pada sumber pembiayaan formal. Sasaran pengembangan selanjutnya adalah pada wilayah yang telah memiliki akses yang tinggi pada sumber pembiayaan formal, melalui program *linkage* antara LKMA dengan penyalur skema kredit program, yaitu skema KUR.

6.3. Strategi Pengembangan

Berdasarkan arah dan sasaran pengembangan tersebut diatas, strategi yang ditempuh dalam pengembangan kelembagaan keuangan mikro agribisnis^{29,39,50} adalah (1) mengoptimalkan kelembagaan eksisting petani yang telah ada;

(2) mendorong tumbuhnya usaha ekonomi produktif petani; (3) mendorong budaya menabung bagi petani untuk agunan tunai guna akses pada sumber pembiayaan luar LKMA dan mitigasi tunggakan kredit di LKMA; (4) mengembangkan program *linkage* antara LKMA dengan sektor perbankan; (5) melakukan pemetaan dan klasifikasi LKMA, dan diintegrasikan dengan program pengembangan agribisnis komoditas unggulan.

Upaya meningkatkan akses petani kecil pada sumber permodalan yang berkelanjutan ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan optimalisasi LKMA yang ada saat ini. Pembinaan dan pengawasan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang beranggotakan Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, OJK, serta Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kementerian Pertanian menjadi garda terdepan pengembangan LKMA. Jajaran setingkat eselon-1 yang memiliki fungsi dan tugas serta kewenangan dalam aspek permodalan bertindak sebagai koordinator.

Selain memperkuat LKMA yang sudah terbentuk dan berkembang, yang eksisting, strategi pengembangan lain adalah membentuk LKMA baru melalui pengembangan *pilot project* di beberapa lokasi kabupaten yang belum memiliki LKMA, memiliki potensi sumberdaya pertanian yang memadai, terdapat dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, dengan mengimplementasikan kaidah-kaidah keuangan mikro yang sehat yang memiliki fitur khusus bagi petani kecil sebagaimana yang dikembangkan pada LKMA eksisting.

VII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya muliakan,

7.1. Kesimpulan

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sebagai kelembagaan keuangan bagi petani kecil dengan dukungan fasilitasi pemerintah, adalah sarana yang sangat esensial dan solusi yang tepat serta diyakini mampu untuk meningkatkan akses petani pada sumber permodalan yang mudah, cepat dengan biaya yang rendah. Dengan akses yang semakin tinggi terhadap permodalan, petani dapat mengadopsi teknologi berproduksi secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas dan produksi usahatani. Dengan biaya modal yang rendah dari LKMA dan produksi usahatani yang maksimal, petani dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.

Inovasi kelembagaan LKMA yang sehat dapat menjadi jaminan bahwa petani kecil adalah layak kredit dan layak usaha, serta mampu dan bersedia membayar kembali pinjamannya. Introduksi instrumen layanan tabungan dalam LKMA dapat meningkatkan pemupukan modal internal petani, yang dapat digunakan sebagai salah satu jaminan untuk akses pada sumber permodalan.

Kehadiran Fasilitator Pembiayaan Pertanian (FPP) sebagai pendamping petani dan LKMA, meningkatnya kemampuan modal internal petani, dan program *linkage* LKMA dengan perbankan dapat memitigasi risiko kredit dan meningkatkan kualitas pelayanan kredit untuk petani kecil secara berkelanjutan.

7.2. Implikasi Kebijakan

Perlunya dukungan kebijakan fiskal berupa subsidi bunga/margin, premi asuransi untuk mitigasi risiko kredit dan gagal usaha tani. Selain itu, dukungan modal dan anggaran pendampingan bagi LKMA dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta mendorong *linkage* LKMA dengan bank perlu memperoleh prioritas. Untuk itu diperlukan payung hukum yang dapat menjadi pedoman bagi pengembangan LKMA dalam bentuk Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah tingkat kabupaten/kota.

VIII. PENUTUP

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya hormati,

Meningkatkan akses petani kecil pada sumber permodalan di masa depan memerlukan pertimbangan dari berbagai aspek yang sangat luas dan komprehensif, yaitu aspek ekonomi, finansial, sosial, budaya dan keadilan.

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dirancang agar petani dapat meningkatkan akses pada sumber permodalan secara berkelanjutan, dan bersinergi dengan Unit Khusus Pertanian (UKP) pada bank-bank milik pemerintah dan pemerintah daerah, yang diamanatkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Usaha Tani. Oleh karena itu pengembangan LKMA ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya.

Dengan akses pada permodalan melalui LKMA, petani akan lebih bergairah dalam berusaha tani, dapat mengadopsi teknologi berproduksi secara maksimal, serta mampu mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan produksi pertanian dan pendapatannya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dengan demikian inovasi kelembagaan LKMA memiliki efek pengganda yang sangat besar, yang secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya hormati.

Perkenankanlah saya menyampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga pada penyampaian orasi ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam kesempatan ini ijin saya secara khusus menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan saya sebagai Peneliti Ahli Utama; terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Menteri Pertanian; Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kepala Badan Litbang Pertanian, Sekretaris Badan Litbang Pertanian, Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam meniti karir sebagai peneliti dan menyampaikan orasi ilmiah ini.

Terima kasih saya sampaikan pula kepada Majelis Profesor Riset Kementerian Pertanian, yaitu: Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto, MS (Ketua), Prof. Dr. Elna Karmawati (Sekretaris), serta Prof. Dr. Hasil Sembiring, Prof. Dr. Ismeth Inounu, dan Prof. Dr. Fahmuddin Agus, sebagai anggota yang telah mengkoordinir proses penelaahan naskah dan terselenggaranya pengukuhan profesor riset pada hari ini.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penelaah Naskah Orasi yaitu, Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto, Prof. Dr. Hasil Sembiring, Prof. Dr. Bambang Subiyanto (LIPI), atas koreksi dan saran yang sangat konstruktif, serta dukungannya, sehingga naskah ini layak diorasikan.

Terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada Prof. Dr. Achmad Suryana sebagai penelaah internal PSEKP, Prof. Dr. Irsal Las sebagai penelaah internal Badan Litbang

Pertanian, Dr. Sumedi, Prof. Dr. Eriyatno, Dr. Haryono, Prof. Dr. Benny Rachman, Dr. Ir. Saptana atas dukungan dan kerelaannya berbagi pemikiran dan pengalaman.

Secara khusus ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Dr. Effendi Pasandaran, ketika itu sebagai Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi ke jenjang S3 atas biaya sendiri di Institut Pertanian Bogor.

Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Faisal Kasryno, ketika itu sebagai Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian yang telah memberikan kesempatan kepada saya bersama Dr. Chairil Anwar Rasahan (alm) sebagai pelaksana dan terlibat penuh pada kaji tindak (*action research*) tentang pelayanan kredit perdesaan untuk mengurangi kemiskinan.

Terima kasih kepada rekan-rekan kerja Ikarianto Hariyadi, SE, Dr. Sumedi, dan Dr. Erma Suryani yang telah memfasilitasi penyusunan naskah orasi ini. Terima kasih kepada Eni Widjajati, SS.,M.AP, Siti Nuraida, Restu Puji Hidayat, A.Md., yang telah membantu dan menyiapkan dokumen dalam penyusunan naskah orasi ini.

Kepada guru dan dosen yang telah mendidik saya, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu pengetahuan yang telah diajarkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Penyelenggara Orasi Pengukuhan Profesor Riset dan seluruh undangan, serta rekan-rekan peneliti dan analis kebijakan PSEKP.

Terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga diberikan kepada kedua orang tua yang saya cintai dan muliakan, Bapak Kasmolan (Alm) dan Ibu Rumi'ah (Almh) atas kasih sayangnya dan doa-doanya yang tiada henti untuk

keberhasilan saya, kepada Bapak Nitihardjo Said (Alm) dan Ibu Sumarem (Almh) atas kasih sayang, didikan dan doa-doanya untuk kesuksesan saya. Terima kasih juga saya haturkan kepada mertua yang terhormat Bapak Soetardi (alm), Ibu Soemartijah (almh), Bapak Handoko (Alm), dan Ibu Soepiatun (Almh). Selanjutnya kepada kakak-kakak dan adik-adik saya, terima kasih atas dukungan dan doa-doanya.

Secara khusus kepada istri tercinta Ir. Hj. Henny Windarti MSi (Almh) dan Erny Hertanti SH., serta anak-anak kami tersayang Maulida Hayuningtyas, S.TP, MSi., Listya Citraningtyas, SPi., Hanif Pramudya, S.TP, MM., Gigih Taufan Herdianto, S.PI., serta para menantu Dayo Ciptanda, SE., Amrizal Yusri, S.Hut., Rasmi Widuri, M.Sc., atas pengertian, dukungan semangat dan doa-doanya yang tak pernah henti. Orasi ini juga saya persembahkan untuk cucu-cucu tersayang Excelsa Ayuannisa dan Affan Zikrivirendra.

Atas segala kekurangan dan kekhilafan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ridho dan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillah Robbil'aalamiin, saya akhiri orasi ilmiah ini. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian.

Wabillahaufiq wal Hidayah.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Syukur M**, Sumaryanto, Sumedi. Kinerja Kredit Pertanian Dan Alternatif Penyempurnaannya Untuk Membangun Pertanian. Monograph. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 1999.
2. **Syukur M**, Sumaryanto, Soedarsono S, Anugrah IS. Kredit Usahatani: Kinerja Dan Upaya Penyempurnaan. Policy Paper No. 4. Bappenas, Jakarta. 1999.
3. **Syukur M**. Analisis Keberlanjutan Dan Perilaku Ekonomi Peserta Skim Kredit Rumahtangga Miskin. Disertasi Doktor. Institut Pertanian Bogor. 2002.
4. **Syukur M**, Rachman HPS, Pasaribu SM. Pola Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Di Pedesaan Jawa Barat. Prosiding Patanas Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Badan Litbang Pertanian. 1988.
5. **Syukur M**, Agustian A, Kustiari R. Identifikasi Wilayah Miskin Di Propinsi Sumatera Selatan. Prosiding Pengembangan Hasil Penelitian. Kemiskinan Di Pedesaan: Masalah Dan Alternatif Penanggulangannya. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. 1995.
6. Yunus M. Credit for Self-Employment : A Fundamental Human Right. Grameen Bank, Dhaka. 1981.
7. Widhiyanto I, Nuryartono N, Harianto, Siregar H. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi: Implementasi dan Persepsi oleh Petani Padi. Anal Kebijak Pertan 2018; 15(2):99-112.
8. OJK. Strategi Dan Kebijakan Pembiayaan Pertanian

Inklusif. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta. 2019.

9. Hafidhuddin D, **Syukur M.** Pembiayaan Syariah Dalam Pembangunan Pertanian. Pusat Pembiayaan Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta. 2008.
10. **Syukur M**, Sumaryanto, Muslim C. Pola Pelayanan Kredit Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah di Pedesaan Jawa Barat. Forum Penel Agro Ekon 1993; 11(2):1-13.
11. **Syukur M.** Pembiayaan Pertanian Dalam Dinamika Ekonomi Pertanian: Membangun Lembaga Keuangan Mikro Berkelanjutan Bagi Pelaku Usaha Pertanian. Makalah Disampaikan Pada Konperensi Nasional ke XV Dan Kongres Ke XIV PERHEPI. 2007.
12. Agbola FW, Acupan A, Mahmood A. Does microfinance reduce poverty? New evidence from Northeastern Mindanao, the Philippines. *J Rural Stud* 2017; 50:159-171.
13. Toth R. Sustaining Myanmar's Microfinance Sector during the COVID-19 Economic Crisis to Support Food Security, Resilience, and Economic Recovery. Strategy Support Program Policy Note 03. IFPRI, Myanmar. 2020.
14. Soentoro, Supriyati, Jamal E. Sejarah Perkreditan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan. Monograph Series No. 3. Perkembangan Perkreditan Pertanian di Indonesia. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Bogor. 1992.
15. Ashari. Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. *Anal Kebijakan Pertan* 2006; 4(2):146-164.
16. **Syukur M.** Acces to Farm Credit By Small-Scale Farmers. Paper presented at the Internasional Seminar on Farm Credit

Issues in Asia. Seoul, Korea; 2004 June.

17. Kementerian Pertanian. Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi. Direktorat Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta. 2015.
18. Bhatt V V. Financial Innovation and Credit Market Development. Working Paper Series 52. The World Bank, Washington, DC. 1989.
19. **Syukur M.** Karya Usaha Mandiri : Suatu Model Alternatif Skim Kredit untuk Golongan Miskin di Pedesaan Indonesia. Forum Penelit Agro Ekon 1992; 9-10(2-1):120-127.
20. Eriyatno, Kolopaking LM. Platform Agfin 4.0. Sistem Pembiayaan Untuk Usaha Mikro Pertanian. IPB Press, Bogor. 2019.
21. Rasahan CA, **Syukur M.** Kontribusi Sektor Pertanian Menuju Struktur Pendapatan Berimbang di Pedesaan. In: *Prosiding Patanas Perkembangan Struktur Produksi Ketenagakerjaan Dan Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Badan Litbang Pertanian, Bogor; 1989:229-237.
22. Kuntjoro. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Kembali Kredit Bimas Padi (Studi Kasus Di Kabupaten Subang, Jawa Barat). Disertasi Doktor. Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. 1983.
23. Sanim B. Efektivitas Penyaluran dan Pengembalian KUT Pola Khusus. J Agro Ekon 1998; 17(1):51-65.
24. **Syukur M.** Karya Usaha Mandiri : An Action Research on Rural Credit to Poverty Alleviation in Indonesia. In: Getubig IP, Johari MY, Thas AMK, eds. *Overcoming Poverty Through Credit: The Asian Experience in*

Replicating The Grameen Approach. Asian and Pacific Development Centre, Kuala Lumpur; 1993:261-288.

25. **Syukur M**, Mayrowani H, Marisa Y, Sutopo MF. Peningkatan Peranan Kredit Dalam Menunjang Agribisnis Di Pedesaan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. 2000.
26. **Syukur M**, Hastuti EL, Soentoro, et al. Kajian Pembiayaan Pertanian Mendukung Pengembangan Agribisnis Dan Agroindustri Di Perdesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor. 2002.
27. Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik. Luas Panen Padi 2019. 2020.
28. Iqbal M. Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Gramedia, Jakarta. 2010.
29. **Syukur M**. Membangun Lembaga Keuangan Mikro Agro yang Lestari. In: Syukur M, Fauzi AM, Rachmawati D, eds. *Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro*. Business Innovation Center of Indonesia, bekerjasama dengan Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta; 2003:77-89.
30. **Syukur M**. Developing Sustainable MAFI (Micro-Scale Agricultural Financial Institution) For Solving The NPL Problem in Agricultural Financial System. Published online. 2006.
31. Due JM, Darmawan D, **Syukur M**. Lessons for Africa from Indonesia's Experience in Smallscale Entrepreneurial Finance. *African Dev Rev* 1992; 4(1):47-63.
32. Saqib SE, Kuwornu JKM, Panezia S, Ali U. Factors determining subsistence farmers' access to agricultural

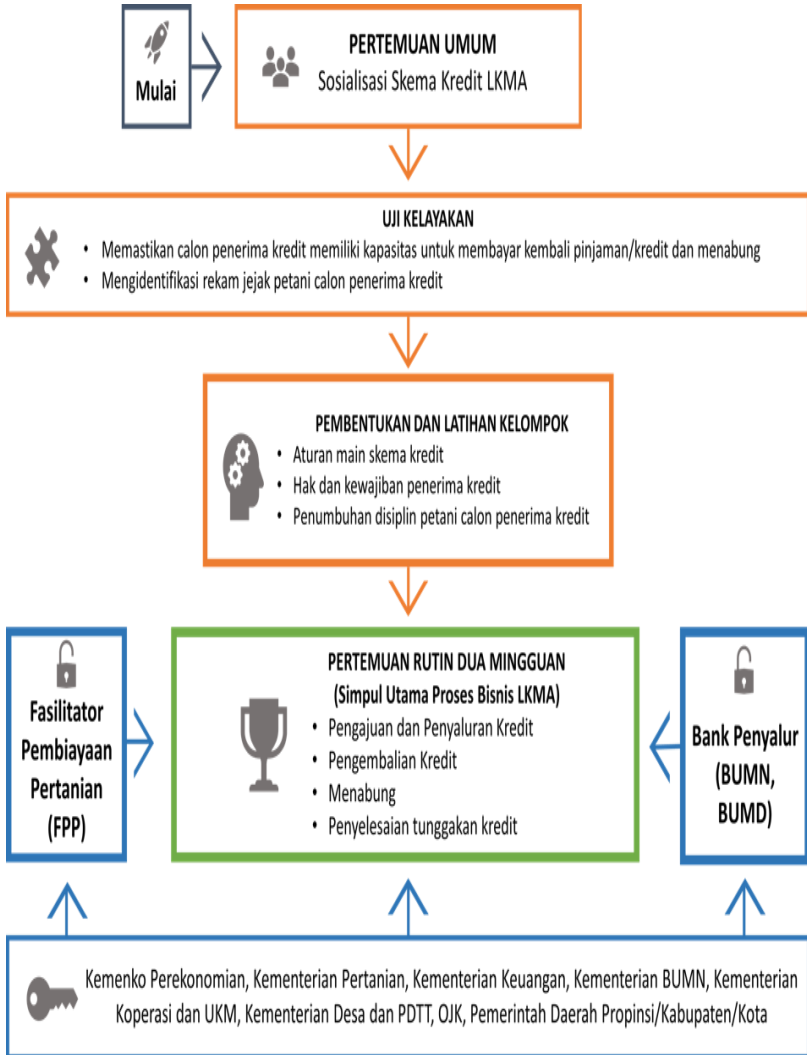
credit in flood-prone areas of Pakistan. *Kasetsart J Soc Sci* 2018; 39(2):262-268.

33. Irianto B, **Syukur M**, Santoso P. The Implementation of Microfinance Institution to Improve the Banana Farming system in Lumajang, East Java. In: *Proceeding of The Asia-Pasific Symposium on Quality Management For Agri-Foods in Suply Chains.* ; 2006:38-44.
34. Saleh Y, Mulyo JH, Waluyati LR. Efisiensi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gabungan Kelompok Tani dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan: Studi Kasus di Kabupaten Bantul Tahun 2012. *J Agro Ekon* 2012; 30(2):129-144.
35. **Syukur M**, Sudaryanto T. Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif Mendukung Pembangunan Ekonomi Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor. 2002.
36. **Syukur M**, Mappaona, Suprahtomo, et al. Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Penyaluran Dan Pemanfaatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan. Kementerian Pertanian. 2009.
37. **Syukur M**, Suliyanto H, Abdurachman E, et al. Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Kementerian Pertanian, Jakarta. 2010.
38. Rasahan CA, **Syukur M**. Karya Usaha Mandiri Arah Baru Menjangkau Golongan Termiskin di Pedesaan. In: Danusaputro M, Colter Y, Suharto P, eds. *Monetisasi Pedesaan. Bunga Rampai Keuangan Pedesaan.* Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta; 1991:123-140.

39. Batubara K. Model BMI Syariah. Buku Pandu. Elex Media Komputindo. Kompas Gramedia. Jakarta. 2020.
40. **Syukur M.** Kemitraan Usaha Sebagai Strategi Pemasaran. Prosiding Agribisnis: Peluang Dan Tantangan Agribisnis Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Bogor; 1995: 60-75.
41. Erwidodo, Rachmat M, **Syukur M.** Peluang dan Tantangan Agribisnis Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. In: *Prosiding Agribisnis: Peluang Dan Tantangan Agribisnis Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Bogor; 1995:1-8.
42. **Syukur M,** Rusastra IW, Anugrah IS. Kajian Kelembagaan Kredit Usahatani. In: *Monograph Series No. 21*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor; 2002:112-130.
43. Setiawan S. Keuangan Inklusif Dalam Inovasi Skema Asuransi Usaha Tani Padi, Dalam Terobosan Sektor Jasa Keuangan Di Era Digital. (Nizar MA, ed.). IPB Press, Bogor. 2019.
44. Rachmat M, Saliem HP, **Syukur M.** Situasi Kekeringan dan Alternatif Penanggulangannya. In: *Monograph Series. Analisis Kebijakan: Pembangunan Agribisnis Di Pedesaan Dan Analisis Dampak Krisis*. Pusat Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Bogor; 1998:183-205.
45. Ilham N, Rivai RS, **Syukur M,** Syahyuti, Rachmita AR. Desain Model Pembiayaan Pada Kawasan Pembangunan Pertanian Berbasis Korporasi Mendukung Program Serasi. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor. 2019.

46. Song X, Xiao Z, Wu Y, Yang X, Liao C, Xie G. Impact of Agricultural Financial Support on Agricultural Economic Development in South China. *Open J Soc Sci* 2019; 07(02):178-184.
47. Widigdo AMN, Marimin, Fahmi I, Beik IS. Business Process Reengineering of Funding on Indonesia's Islamic Banks. *Al-Iqtishad J Ilmu Ekon Syariah* 2016; 8(1):19-32.
48. **Syukur M**, Sumaryanto, Saptana, et al. Kajian Skim Kredit Usahatani Menunjang Pengembangan IP-Padi 300 Di Jawa Barat. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor. 1999.
49. **Syukur M**, Sugiarto, Hendiarto, Wiryono B. Analisis Rekayasa Kelembagaan Pembiayaan Usaha Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor. 2003.
50. **Syukur M**. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Keuangan Mikro. In: **Syukur M**, Fauzi AM, eds. *Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro*. Business Innovation Center of Indonesia, bekerjasama dengan Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta; 2003:90-100.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Alur Proses Seleksi Calon Penerima, Penyaluran, dan Pengembalian Kredit LKMA

DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH

Buku

1. **Syukur M**, Suliyanto H, Abdurachman E, Syarwani M, Santosa B, Riva'i R.S, Sumarmi, Sinuraya J.F, Agustin N.K, Fitri R, Irianti F, Gunawan, Amanah I.A. Pedoman Umum. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Kementerian Pertanian. 2010.
2. **Syukur M**, Mappaona, Suprahtomo, Hermanto, Ali Y, Widodo A, Suharyanto, Ikhwan M. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BLM PUAP. Kementerian Pertanian. 2009.
3. Ma'turidi DH, **Syukur M**. Pembiayaan Syariah Dalam Pembangunan Pertanian. Pusat Pembiayaan Pertanian, Departemen Pertanian. 2008.
4. Saragih B, Sajogyo. Usman S, Kwabena H.J, Jamasy O, Harjanto, **Syukur M**, Pribadi N, Siregar H. Pembangunan Pertanian Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bina Swadaya, Jakarta. 2001.
5. **Syukur M**, Sumaryanto, Soedarsono S, Anugrah I.S. 1999. Kredit Usahatani : Kinerja dan Upaya Penyempurnaan. Biro Perencanaan Kehutanan, Bappenas, Jakarta. 1999.
6. Sulaiman, AA, K. Subagyono, F. Djufry, P. Simatupang, D. Soetopo, **M. Syukur**, D. Pranowo, M. Herman, A. Aunillah, B. Prastowo. Biofuel 100. Energi Masa Depan Dunia. IAARD Press, Jakarta. 2019.

Bagian dari Buku

7. **Syukur M.** Membangun Lembaga Keuangan Mikro Agro yang Lestari. Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro. *Business Innovation Center of Indonesia*, bekerjasama dengan Kantor Kementerian Koperasi dan UKM; 2003: 77-89.
8. **Syukur M.** Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Keuangan Mikro. Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro. *Business Innovation Center of Indonesia*, bekerjasama dengan Kantor Kementerian Koperasi dan UKM; 2003: 90-100.
9. Sudaryanto T, **Syukur M.** Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif Mendukung Pembangunan Ekonomi Pertanian. Monograph Series. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 2002: 102-110.
10. **Syukur M**, Rusastra I.W, Anugrah I S. Kajian Kelembagaan Kredit Usahatani. Monograph Series No. 21. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 2002: 112-130.
11. **Syukur M**, Sumaryanto, Sumedi. Kinerja Kredit Pertanian dan Alternatif Penyempurnaannya Untuk Membangun Pertanian. Monograph Series No. 20. Analisis dan Perspektif Kebijakan Pembangunan Pertanian Pasca Krisis Ekonomi. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 1999: 221-246.
12. **Syukur M**, Kusnadi D, Andrida R. Industri Gula Merah dan Pemanis Lainnya. Ekonomi Gula di Indonesia. Penerbit Institut Pertanian Bogor, Bogor; 1998: 207-247.

13. **Syukur M**, Syahyuti, Anugrah I.S. Kehilangan Hasil Panen dan Pascapanen Padi Dalam Upaya Peningkatan Kapasitas Penyediaan Pangan. Monograph Series No.18. Analisis Kebijakan: Pembangunan Agribisnis di Pedesaan dan Analisis Dampak Krisis. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 1998: 157-171.
14. Rachmat M, Saliem H.P, **Syukur M**. Situasi Kekeringan dan Alternatif Penanggulangannya. Monograph Series. Analisis Kebijakan: Pembangunan Agribisnis di Pedesaan dan Analisis Dampak Krisis. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian; 1998: 183-205.
15. Rasahan C.A, **Syukur M**. Karya Usaha Mandiri Arah Baru Menjangkau Golongan Termiskin di Pedesaan. Monetisasi Pedesaan. Bunga Rampai Keuangan Pedesaan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian; 1991: 123-140.
16. **Syukur M**, Dadang Kusnadi, Rini Andrida. Dalam Ekonomi Gula di Indonesia. Sawit, MH., P. Suarno, Anas Rachman (Eds). Penerbit Institut Pertanian Bogor. 1999.

Jurnal

17. Jean M.Due, Darmawan D, **Syukur M**. Lessons for Africa From Indonesia's Experience In Small Scale Entrepreneurial Finance. Jurnal African Development Review 1992; 4(1): 47-63.
18. **Syukur M**, Sumaryanto, Chaerul Muslim. Pola Pelayanan Kredit Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah di Pedesaan Jawa Barat. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian 1993; 11 (2): 1-13.

19. **Syukur M.** Karya Usaha Mandiri (KUM). Suatu Model Alternatif Skim Kredit untuk Golongan Miskin di Pedesaan Indonesia. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian 1992; 9(2), 10(1): 120-127.

Prosiding Internasional

20. Irianto B, **Syukur M**, Santoso P. The Implementation of Microfinance Institution to Improve the Banana Farming System in Lumajang, East Java. Proceeding of The Asia-Pacific Symposium on Quality Management For Agri-Foods in Suply Chains; 2006: 38-44.
21. **Syukur M.** Karya Usaha Mandiri : An Action-research on Rural Credit for Poverty Alleviation in Indonesia. Overcoming Poverty Through Credit. The Asian Experience in Replicating the Grameen Bank Approach; 1993: 261-288.

Prosiding Nasional

22. **Syukur M**, Agustian A, Kustiari R. Identifikasi Wilayah Miskin di Propinsi Sumatera Selatan. Prosiding Pengembangan Hasil Penelitian. Kemiskinan di Pedesaan: Masalah dan Alternatif Penanggulangannya. Pusat Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian; 1995: 85-101.
23. Erwidodo, Rachmat M, **Syukur M.** Peluang dan Tantangan Agribisnis Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Rangkuman. Prosiding Agribisnis: Peluang dan Tantangan Agribisnis Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Pusat Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian; 1995: 1-8.

24. **Syukur M.** Kemitraan Usaha Sebagai Strategi Pemasaran. Prosiding Agribisnis: Peluang dan Tantangan Agribisnis Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Pusat Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian; 1995: 60-75.
25. Rasahan C.A, **Syukur M.** Kontribusi Sektor Pertanian Menuju Struktur Pendapatan Berimbang di Pedesaan. Prosiding Patanas Perkembangan Struktur Produksi Ketenagakerjaan dan Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan. Pusat Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian; 1989: 229-237.
26. **Syukur M,** Rachman HPS, Pasaribu SM. Pola Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Barat. Prosiding Patanas Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian; 1988: 299-313.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Dr. Ir. Mat Syukur, MS
Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 28 Desember 1958
Anak ke : 1 (satu)
Nama Ayah Kandung : Kasmolan (Almarhum)
Nama Ibu Kandung : Rumi'ah (Almarhumah)
Nama Istri : Henny Windarti
(Almarhumah, 1983-2013)
Erny Hertanti (2015)
Jumlah Anak : 4 (empat) Orang
Nama Anak : 1. Maulida Hayuningtyas
2. Listya Citraningtyas
3. Hanif Pramudya
4. Gigih Taufan Herdianto
Nama Instansi : Pusat Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian
Judul Orasi : Inovasi Kelembagaan
Keuangan Mikro Agribisnis
Untuk Meningkatkan Akses
Petani Kecil pada Sumber
Permodalan.
Bidang Kepakaran : Sosial Ekonomi Pertanian
No. SK Pangkat Terakhir : Keppres 32/K/ Tahun 2016
Tanggal 3 Mei 2016
No. SK Peneliti Ahli Utama : 32/M Tahun 2018
Tanggal 5 Juni 2018

B. Pendidikan Formal

No	Jenjang	Nama Sekolah	Tempat/Kota	Tahun
1.	SD	SD Negeri Babat 1	Babat, Lamongan	1971
2.	SMP	SMP Negeri Babat	Babat, Lamongan	1974
3.	SMA	SMA Negeri IV	Malang	1977
4.	S1	IPB	Bogor	1982
5.	S2	IPB	Bogor	1988
6.	S3	IPB	Bogor	2001

C. Pendidikan Non Formal yang Sesuai dengan Kompetensi

No	Training/Kursus	Tempat/Kota	Tahun
1.	On The Job Training of Grameen Bank (Bank Desa) Replication Project for Rural Poverty Alleviation Program	Bangladesh	1989
2.	On The Job Training of Grameen Bank (Bank Desa) Replication Project for Rural Poverty Alleviation Program	Malaysia	1989
3.	Financial Modeling for Grameen Bank (Bank Desa) Replication Project	Dhaka, Bangladesh	1992
4.	Planning, Monitoring and Evaluation of Irrigation Performance	Baguio City, The Philippines	1993

(Lanjutan)

No	Training/Kursus	Tempat/Kota	Tahun
5.	Agro-Industrial System Development and Management	Asian Intitute of Technology (AIT), Bangkok, Thailand	1993
6.	Micro-finance Management	University of Queensland, Australia	2002
7.	Leadership and Research Management	Wageningen University, Belanda	2004

D. Jabatan Struktural

No	Jabatan	Tahun
1.	Kepala Sub-Bidang Pelayanan Teknis, Bidang Pelayanan Penelitian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian	1992-1993
2.	Kepala Sub-Bidang Komunikasi Penelitian, Bidang Pelayanan Penelitian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian	1993-1994
3.	Kepala BPTP Jawa Timur, Badan Litbang Pertanian	2004-2005
4.	Kepala Bidang Program dan Evaluasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Badan Litbang Pertanian	2005-2006
5.	Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian, Sekretariat Jenderal	2006-2010
6.	Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal	2010-2011

(Lanjutan)

No	Jabatan	Tahun
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian	2011-2013
8.	Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Teknologi, Kementerian Pertanian	2013-2016
9.	Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Kementerian Pertanian	2016-2018

E. Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	TMT	Golongan	Pejabat
1.	Penata Muda	1 Maret 1983	III/A	Mentan
2.	Penata Muda Tingkat I	1 April 1987	III/B	Mentan
3.	Penata	1 April 1994	III/C	Mentan
4.	Penata Tingkat I	1 April 1998	III/D	Mentan
5.	Pembina	1 Oktober 2002	IV/A	Mentan
6.	Pembina Tingkat I	1 April 2006	IV/B	Mentan
7.	Pembina Utama Muda	1 April 2008	IV/C	Presiden
8.	Pembina Utama Madya	1 April 2012	IV/D	Presiden
9.	Pembina Utama	1 April 2016	IV/E	Presiden

F. Jabatan Peneliti

No	Jenjang Jabatan	TMT Jabatan
1.	Asisten Peneliti Madya	1989
2.	Ajun Peneliti Muda	1993
3.	Ajun Peneliti Madya	1997

(Lanjutan)

No	Jenjang Jabatan	TMT Jabatan
4.	Peneliti Madya	2006
5.	Peneliti Ahli Utama	2018

G. Penugasan dan Menghadiri Konferensi Ke Luar Negeri, 2014-2019

No	Agenda	Tempat
1.	Ketua Delegasi RI pada Penyerahan Bantuan Traktor Pemerintah RI kepada Permanent Secretary Kementerian Pertanian Gambia, dalam rangka penguatan Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), 2014	Banjul, Gambia
2.	Anggota Delegasi pada Sidang Regional Consultation for the Asia Pacific Region on Role of Family Farming in the 21 st Century: Achieving the Zero Hunger Challenges by 2025, 2014.	Chennai, India
3.	Anggota Delegasi pada The 37th ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture (AMAF), 2015	Manila, The Philippines
4.	The 4th Meeting of G20 Agricultural Chief Scientists (MACS), 2015	Izmir, Turkey
5.	Anggota Delegasi RI pada Global Forum for Food and Agriculture, 2016	Berlin, Jerman

(Lanjutan)

No	Agenda	Tempat
6.	Ketua Delegasi RI pada G20 Agriculture Ministers' Meeting, 2016	Xi'an, China
7.	Anggota Delegasi RI pada The 38th ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture (AMAF), 2016	Singapore
8.	Menghadiri World Coffee Producers Forum, 2017	Medelin, Kolombia
9.	Anggota Delegasi RI pada The 39th ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture (AMAF), 2017	Chiang Mai, Thailand
10.	The 34th Session of the Food and Agriculture (FAO) Regional Conference for Asia and the Pacific. 2018	Fiji
11.	Ketua Delegasi RI pada G20 Agriculture Ministers' Meeting, 2018.	Buenos Aires, Argentina
12.	Anggota Delegasi RI pada The 40th ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture (AMAF), 2018.	Hanoi, Viet Nam
13.	Anggota Delegasi RI pada G20 G20 Agriculture Ministers' Meeting, 2019	Niigata, Jepang
14.	Anggota Delegasi pada Pertemuan Bilateral Indonesia-Argentina, 2019	Buenos Aires, Argentina
15.	Anggota Delegasi RI The 41st ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture (AMAF), 2019	Brunei Darussalam

H. Keterlibatan dalam Pengelolaan Jurnal Ilmiah

No	Nama Jurnal	Penerbit	Peran/Tugas	Tahun
1.	Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian	PSEKP	Editor	2019-sekarang

I. Publikasi Ilmiah

No	Kualifikasi	Jumlah
1.	Sebagai Penulis Tunggal	4
2.	Menulis Bersama Penulis Lain	22
Total		26

No	Bahasa	Jumlah
1.	Publikasi Ilmiah Bahasa Indonesia	23
2.	Publikasi Ilmiah Bahasa Inggris	3
3.	Publikasi Ilmiah Bahasa Asing Lainnya	-
Total		26

J. Organisasi Profesi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI)	Anggota	2000-sekarang
2.	Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO)	Anggota	2019-sekarang
3.	Perkumpulan Ahli Sistem Indonesia (PASINDO)	Anggota	2018-sekarang

K. Tanda Penghargaan

Tahun	Jenis Penghargaan	Pejabat/Instansi
2000	Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	Presiden RI
2008	Satyalancana Karya Satya 20 Tahun	Presiden RI
2013	Satyalancana Karya Satya 30 Tahun	Presiden RI



Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jl. Ragunan No. 29 Pasar Minggu, Jakarta 12540
Telp. : 62 21 7806202, Faks. 62 21 7800644
E-mail: iaardpress@litbang.pertanian.go.id

ISBN 978-602-344-290-4

